

Membangun Kebijakan Industri Pertahanan di Era Globalisasi *(Building Defense Industrial Policy in the Era of Globalization)*

Muhamad Tarom., SP, MSI. Universitas Sebelas April
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dan Hery Yuniarto,SE.M.Si (Han)
Analisis Pertahanan Negara Madya Setditjen Pothan

I. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Industri pertahanan memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan negara sekaligus berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam era globalisasi, industri pertahanan tidak hanya menjadi alat untuk mendukung keamanan nasional, tetapi juga sebagai sektor ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi teknologi, dan mengurangi ketergantungan pada impor alutsista. Namun, tekanan globalisasi juga membawa tantangan besar, termasuk privatisasi, minimnya peran negara, dan fundamental pasar bebas yang dapat mempengaruhi kebijakan industri pertahanan.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan meningkatnya kebutuhan pertahanan, negara-negara di dunia berlomba-lomba untuk mengembangkan industri pertahanannya. Di Indonesia, industri pertahanan mulai mendapat perhatian serius sejak adanya regulasi yang mengatur industri strategis nasional, seperti UU No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat kemandirian industri pertahanan dalam memenuhi kebutuhan alat utama sistem senjata (alutsista) tanpa harus bergantung pada impor.

Namun, tantangan besar masih dihadapi, terutama dalam hal inovasi teknologi, anggaran, dan kompetisi dengan industri pertahanan global. Banyak negara maju telah menguasai teknologi canggih dalam produksi alutsista, sementara Indonesia masih berupaya melakukan transfer teknologi melalui kerja sama

dengan negara-negara lain. Selain itu, ketergantungan pada anggaran pemerintah sering kali menjadi hambatan dalam pengembangan industri pertahanan yang berkelanjutan.

Dalam konteks global, industri pertahanan juga menjadi bagian dari diplomasi pertahanan, di mana negara-negara menggunakan industri pertahanannya sebagai alat politik dan ekonomi. Hal ini terlihat dari banyaknya perjanjian kerja sama internasional yang melibatkan pertukaran teknologi dan pengadaan alutsista antarnegara. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif untuk memastikan bahwa industri pertahanan nasional dapat berkembang secara mandiri dan mampu bersaing di tingkat global.

b. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan pembangunan industri pertahanan nasional dalam menghadapi tantangan globalisasi?
2. Apa dampak globalisasi terhadap kebijakan industri pertahanan Indonesia?
3. Bagaimana strategi yang dapat dilakukan untuk memperkuat industri pertahanan nasional?

c. Tujuan Penulisan

1. Menganalisis kebijakan industri pertahanan dalam konteks globalisasi.
2. Mengidentifikasi tantangan yang dihadapi industri pertahanan Indonesia.
3. Menyusun strategi untuk mengembangkan industri pertahanan nasional agar lebih kompetitif di tingkat global.

II. Tinjauan Pustaka

Kajian industri pertahanan telah banyak dilakukan oleh para ahli ekonomi dan keamanan. Emile Benoit menegaskan bahwa anggaran pertahanan yang besar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, sedangkan pandangan neoliberalisme melihat belanja pertahanan sebagai pemborosan jika tidak berkontribusi langsung pada ekonomi. Selain itu, Huntington membahas hubungan antara sektor bisnis dan militer, yang semakin erat dalam era pasca-Perang Dunia II.

Beberapa kebijakan industri pertahanan juga telah ditetapkan, seperti Permenhan No. 24 Tahun 2010 tentang Masterplan Industri Pertahanan yang menetapkan beberapa

perusahaan seperti PT. PAL, PT. DI, PT. Pindad, dan PT. Dahana sebagai industri strategis nasional. Namun, tekanan globalisasi sering kali mengarah pada privatisasi dan pengurangan peran negara dalam sektor ini.

III. Pembahasan

a. Kajian Historis Perkembangan Industri Pertahanan

Pada masa kerajaan, industri pertahanan berorientasi pada kebutuhan militer kerajaan untuk menegakkan kekuasaannya. Di era kolonialisme, senjata dan peralatan militer menjadi alat ekspansi ekonomi dan dominasi wilayah. Pasca-Perang Dunia II, industri pertahanan berkembang pesat sebagai bagian dari strategi politik dan ekonomi global.

Pada era Perang Dingin, industri pertahanan semakin menjadi alat politik dan ekonomi bagi negara-negara besar, terutama dalam persaingan antara blok Barat dan Timur. Pasca-Perang Dingin, kapitalisme semakin mendominasi, sehingga industri pertahanan berubah menjadi sektor yang mengutamakan keuntungan ekonomi.

b. Dampak Globalisasi terhadap Industri Pertahanan Nasional

1. Tekanan Privatisasi: Globalisasi mendorong privatisasi industri strategis, termasuk industri pertahanan. Padahal, industri ini memiliki peran vital dalam keamanan nasional yang tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar.
2. Ketergantungan pada Impor: Kebijakan yang kurang mendukung industri pertahanan nasional menyebabkan ketergantungan pada impor alutsista, yang berisiko terhadap ketahanan negara.
3. Persaingan Global: Industri pertahanan nasional harus bersaing dengan perusahaan internasional yang memiliki teknologi lebih maju dan modal lebih besar.
4. Intervensi Organisasi Internasional: Lembaga seperti IMF dan WTO sering kali menetapkan regulasi yang dapat membatasi kebijakan industri pertahanan nasional.

c. Strategi Penguatan Industri Pertahanan Nasional

1. Peningkatan Peran Negara: Negara harus tetap menjadi regulator utama dalam industri pertahanan, dengan memberikan dukungan finansial, riset, dan kebijakan afirmatif.
2. Pemberdayaan BUMN Strategis: Perusahaan seperti PT. PAL, PT. DI, dan PT. Pindad perlu diperkuat agar dapat berkontribusi lebih besar dalam pengembangan alutsista nasional.
3. Kolaborasi dengan Swasta: Kerjasama dengan industri swasta dan universitas dalam pengembangan teknologi pertahanan dapat meningkatkan daya saing industri nasional.
4. Diversifikasi Pasar: Meningkatkan ekspor produk pertahanan ke negara-negara sahabat guna memperluas pasar dan mengurangi ketergantungan pada anggaran domestik.
5. Transfer Teknologi: Menjalinkan kerja sama dengan negara maju untuk mendapatkan transfer teknologi guna mempercepat modernisasi industri pertahanan.

IV. Penutup

a. Kesimpulan

Industri pertahanan nasional memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan negara dan berkontribusi terhadap perekonomian. Namun, tantangan globalisasi, termasuk tekanan privatisasi dan ketergantungan impor, mengancam pengembangannya. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan afirmatif dan strategi yang tepat agar industri pertahanan nasional dapat tumbuh dan bersaing di tingkat global.

b. Saran

1. Pemerintah harus mempertahankan perannya sebagai regulator, sponsor, dan customer dalam industri pertahanan.
2. Diperlukan kebijakan anggaran yang berkelanjutan untuk mendukung industri pertahanan.

3. Peningkatan kerja sama internasional dalam transfer teknologi harus menjadi prioritas.
4. Industri pertahanan harus diarahkan tidak hanya untuk kebutuhan militer, tetapi juga untuk kepentingan ekonomi nasional melalui diversifikasi produk dan ekspor.

Referensi

1. Benoit, Emile. *Economic Development and Cultural Change*. Lexington Books, 1978.
2. Huntington, Samuel P. *The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations*. Harvard University Press, 1957.
3. Samekto, FX. *Negara dalam Dimensi Hukum Internasional*. Citra Aditya Bakti, 2009.
4. Saputra, Rezki. "BPK: Alokasi Anggaran Alutsista Tak Relevan dengan Realisasi". Infobanknews, 2014.
5. Marut, Don K. *Fiskalisme Militer di Indonesia: Dari Otoritarianisme ke Neoliberalisme*. ELSAM, 2015.